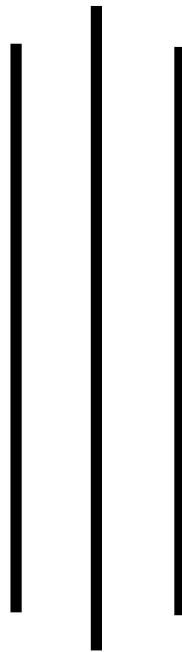


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KALIMANTAN BARAT  
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN



**RENCANA STRATEGIS  
BIDDOKKES POLDA KALBAR  
TAHUN 2020 – 2024**





**RENCANA STRATEGIS  
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLDA KALBAR  
TAHUN 2020-2024  
(REVISI)**

---

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Kondisi Umum**

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya di alokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan.

Pada tingkatan perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan. Dalam sistem perencanaan di Indonesia, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Perencanaan jangka panjang tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode per lima tahunan, yang kemudian akan diterjemahkan kembali oleh Kementerian/ Lembaga ke dalam dokumen Renstranya masing-masing.

Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalbar yang selanjutnya disingkat (Bidokkes Polda Kalbar) merupakan unsur pendukung yang bertugas membina fungsi kedokteran dan kesehatan Polri yang meliputi

kedokteran .....

kedokteran kepolisian, kesehatan Kesamaptaan dan pelayanan kesehatan di lingkungan Polda Kalbar. Dalam Renstra 2015-2019 ada 4 (empat) tema utama yaitu terwujudnya penyelenggaraan kedokteran kepolisian yang handal, professional dan modern sesuai lapis kemampuan dari tingkat pusat sampai kewilayahan untuk kepentingan tugas Kepolisian; Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi personel dan keluarga Polri secara prima pada fasilitas kesehatan Polri untuk meningkatkan derajat kesehatannya; terwujudnya Rikkes seleksi yang professional, bersih, transparan, akuntabel dan humanis; terwujudnya Rikkes berkala dan khusus yang efisien dan efektif serta kesehatan promotif dan preventif yang mampu mencegah gangguan yang diakibatkan faktor-faktor lingkungan kerja, beban tugas dan gaya hidup yang mempengaruhi aspek kesehatan jasmani dan kejiwaan; Meningkatnya peran operasional Dokkes dalam penggelaran operasi kepolisian dan kontinjensi baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam rangka melayani *stakeholders* serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yaitu bertugas membina fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, identifikasi korban bencana (*Disaster Victim Identification*) dan pelayanan kesehatan serta kesehatan kesamaptaaan di lingkungan Polda Kalbar.

## **2 Potensi dan Permasalahan**

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam skala global, regional maupun nasional seperti kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta teknologi transportasi, timbulnya konflik dengan berbagai latar belakang kepentingan, globalisasi, perubahan iklim/*global warming*, epidemi penyakit sebagainya dengan segala permasalahannya, mengakibatkan tugas yang dihadapi oleh Polri sebagai institusi, satuan dan fungsi serta perorangan akan semakin kompleks dan berat.

Tuntutan dan harapan masyarakat serta upaya pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan Polri yang prima, pelayanan publik yang berkualitas dan terselenggaranya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diselenggarakan dengan transformasi kultural dipadukan dengan penataan instrumental dan struktural sebagai suatu proses berkelanjutan harus diwujudkan dengan komitmen yang kuat dan konsisten.

Mengingat .....

Mengingat kondisi tersebut maka tuntutan dan harapan terhadap Dokkes Polda Kalbar semakin meningkat dan kompleks untuk mewujudkan tugas operasional Dokkes Polda Kalbar yang handal dan professional sesuai kebutuhan tugas-tugas operasional Polri serta mewujudkan personel dan satuan Polri yang sehat Samapta yang ditunjang masyarakat Polri yang sehat sejahtera.

**a. Potensi Gangguan Keamanan**

1) Perkembangan Organisasi

Perkembangan organisasi Biddokkes Polda Kabar didasari dengan Undang-undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15) serta peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian daerah.

Dengan peraturan tersebut di atas dapat digunakan sebagai payung hukum dan arah bagi Biddokkes Polda Kalbar untuk melanjutkan reformasi dan mewujudkan tugas pokok, visi, misi dan tujuan Biddokkes Polda Kalbar.

Susunan organisasi Biddokkes Polda Kalbar

1) Unsur Pimpinan

Kabiddokkes Polda Kalbar

2) Unsur Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Subbagian perencanaan dan administrasi disingkat Subbagrenmin membawahi

a) Unsur perencanaan disingkat Urren

b) Urusan Administrasi dan ketatausahaan disingkat Urmintu

c) Urusan keuangan disingkat Urkeu

3) Unsur Pelaksana Tugas Pokok terdiri dari

a) Urusan .....

- a) Sub bidang kedokteran kepolisian disingkat Subbid Dokpol membawahi
  - (1) Urusan kedokteran forensik disingkat Urdoksik
  - (2) Urusan Dissaster Victim Identification disingkat Ur DVI
  - (3) Urusan Kesehatan dan Ketertiban Masyarakat disingkat Urkes Ktms
- b) Sub bidang Kesehatan kepolisian disingkat Subbid Kespol membawahi
  - (1) Urusan Kesehatan kesamapta disingkat Urkes sampta
  - (2) Urusan pelayanan kesehatan disingkat Ur Yankes
  - (3) Urusan Material dan Fasilitas Kesehatan disingkat Ur Matfaskes
- 4) Unsur Pelaksana Pendukung
  - a) Rumah Sakit
  - b) Poliklinik.
- 2) Kondisi umum yang melatarbelakangi pelaksanaan tugas pokok Biddokkes Polda Kalbar untuk setahun kedepan, dapat ditinjau dari kondisi di bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian setahun terakhir dan tantangan tugas, prediksi serta antisipasi tahun 2021;
- 3) tantangan tugas kepolisian ke depan semakin kompleks antara lain di karenakan wabah pandemi Covid-19 yang belum kunjung berakhir, peningkatan gangguan keamanan secara intensitas dan kuantitas seperti street crime, kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal perlu diantisipasi oleh fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian;
- 4) sejalan dengan kemajuan iptek dan kompleksitas modus operandi kriminalitas maka penanganannya termasuk oleh fungsi kedokteran kepolisian harus secara ilmiah dan modern;

5) penyalahgunaan.....

- 5) penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba saat ini sangat memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, permasalahan semakin rumit dengan meningkatnya penularan HIV/AIDS akibat pertukaran penggunaan jarum suntik dan perilaku seks bebas dan menyimpang;
- 6) semakin seringnya terjadi bencana baik karena sebab alam seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung maupun oleh sebab ulah manusia seperti kecelakaan baik darat, laut maupun udara serta terorisme yang perlu ditangani secara intensif agar dapat dilakukan upaya pertolongan, penyelamatan dan pengamanan masyarakat, sehingga dapat mengurangi dampak bencana dan mempercepat pemulihan;
- 7) upaya peningkatan kesejateraan anggota Polri dan ASN Polri Polda Kalbar melalui pelayanan kesehatan dan peningkatan fasilitas kesehatan Polri merupakan faktor yang sangat penting, dan secara langsung akan memberikan pengaruh positif terhadap kesiapan personel dan satuan Polri Polda Kalbar serta kesejahteraan masyarakat Polri Polda Kalbar secara umum yang akan menghasilkan peningkatan kinerja;
- 8) pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Polri baik jangkauan/pemerataan yang dapat dirasakan sampai tingkat Polsek maupun kualitasnya masih perlu dioptimalkan, guna dapat memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat Polri Polda Kalbar;
- 9) Biddokkes Polda Kalbar sebagai salah satu fungsi pendukung tugas-tugas Polri di Polda Kalbar, selalu mendayagunakan segala potensi dan kemampuannya untuk memenuhi tuntutan tersebut, dengan memantapkan komitmen dan konsistensi seluruh jajaran Dokkes Polda Kalbar secara berkelanjutan dan diharapkan terselenggara pelayanan/operasional Dokpol dan Kespole yang bermutu dan sesuai standar sebagaimana level kemampuan organisasi/ faskes Polri.

**b. Analisis SWOT**

Perumusan isu-isu strategis dilakukan sebagai upaya identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Biddokkes Polda Kalbar. Dalam mengidentifikasi isu strategis tersebut, terdapat dua garis besar yang perlu mendapat perhatian, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Aspek lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan yang merupakan potensi wilayah Kalimantan Barat dan perlu penanganan. Sedangkan aspek lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman yang mempengaruhi keberhasilan Biddokkes Polda Kalbar. Dari perkembangan dan perubahan lingkungan strategis di Kalimantan Barat tersebut diatas dilakukan analisa SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats*), yaitu:

**1) Kekuatan (*Strenghts*)**

- a) komitmen pimpinan Polri agar fungsi Dokkes berperan lebih besar pada tugas pembinaan dan operasional Polri dalam bentuk dukungan moril maupun nyata seperti seperti peningkatan peralatan kesehatan pada Faskes Polri sehingga fungsi-fungsi Dokkes semakin berperan dalam berbagai kegiatan Polri di wilayah Kalimantan Barat;
- b) sumber daya Dokkes Polda Kalbar yang dikelola cukup besar dan sangat potensial untuk dikembangkan guna kontribusi optimal mendukung tugas-tugas Polda Kalbar :
  - (1) organisasi Dokkes tergelar dari tingkat Polda hingga tingkat Polres;
  - (2) Biddokkes Polda Kalbar memiliki 17 Poliklinik yang tersebar di 13 Kabupaten/Kotamadya termasuk Poliklinik Mapolda, Sat Brimob, Dit Polair dan SPN Pontianak;
  - (3) jumlah personel Biddokkes Polda Kalbar pada bulan Mei 2020 sebanyak 62 orang terdiri dari Polri sebanyak 49 orang dan PNS sebanyak 13 orang, dengan rincian sebagai berikut :
    - (a) Polri Medis, terdiri dari :

((1)) Dokter .....



- ((1)) Dokter spesialis radiologi 1 orang
  - ((2)) Dokter gigi 2 orang
  - (b) Polri Paramedis, terdiri dari :
    - (aa) Ahli Madya Gizi 1 orang
    - (bb) Ahli Madya Radiologi 1 orang
    - (cc) Analis Kesehatan 1 orang
    - (dd) Perawat Kesehatan 9 orang
    - (ee) Perawat Gigi 3 orang
    - (ff) Tenaga Teknis Kefarmasian 1 orang
  - (c) PNS Medis, terdiri dari :
    - (aa) Dokter Umum 3 orang
    - (bb) Apoteker 1 orang
  - (d) PNS Paramedis, terdiri dari :
    - (aa) Perawat Kesehatan 6 orang
    - (bb) Bidan 1 orang
  - (e) Polri Non Medis, terdiri dari :
    - (aa) S1 Hukum 5 orang
    - (bb) S1 Fisipol 2 orang
    - (cc) SMU/SMA sederajat 23 orang
  - (f) PNS Non Medis, terdiri dari:
    - (aa) S2 Manajemen 1 orang
    - (bb) SMU/SMA sederajat 1 orang
- (4) jumlah materiil dan fasilitas Biddokkes Polda Kalbar adalah :
- (a) Kendaraan bermotor umum :
    - (aa) Jeep 1 unit
    - (bb) Sepeda motor 7 unit
    - (cc) Mobil Minibus 2 unit
  - (b) Kendaraan Khusus :
    - (aa) Ambulance Biddokkes 4 unit
    - (bb) Ambulance klinik Mapolda 1 unit

(cc) Ambulance .....

(cc) Ambulance klinik SPN Pontianak	2 unit
(dd) Ambulance klinik Res Singkawang	1 unit
(ee) Ambulance klinik Res Landak	1 unit
(ff) Ambulance klinik Res Sambas	1 unit
(gg) Ambulance klinik Res Bengkayang	1 unit
(hh) Ambulance klinik Res Sanggau	1 unit
(ii) Ambulance klinik Res K.Hulu	1 unit
(jj) Ambulance klinik Res Ketapang	1 unit
(kk) Ambulance klinik Res Sintang	1 unit
(ll) Ambulance klinik Sat Brimob	2 unit

(c) Alat Komunikasi :

(aa) Pesawat Telepon	1 unit
(bb) Faksimile	1 unit
(cc) Handy Talky	7 unit

(d) Gedung :

(aa) Bangunan Mako	1 unit
(bb) Bangunan Poliklinik Mapolda	1 unit

(e) Senjata Api genggam 5 pucuk.

c) Kemampuan dan kinerja pelayanan kesehatan terus berkembang, antara lain:

- (1) kemitraan yang sangat baik dengan instansi/lembaga untuk mengembangkan upaya promotif dan preventif penyakit-penyakit epidemik seperti virus Novel Corona, HIV/AIDS, Flu Burung, TBC dan lain-lain di bidang penyiapan sumber daya serta operasionalnya.
- (2) Komitmen jajaran Dokkes Polda Kalbar untuk mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat Polri dengan melakukan pengelolaan sumber daya kesehatan dan manajemen kesehatan yang profesional, efektif dan efisien.

(3) pemenuhan .....

(3) Pemenuhan persyaratan untuk akreditasi oleh komisi akreditasi pada Klinik Pratama Polda Kalbar dengan hasil paripurna, dan selanjutnya secara bertahap terus diupayakan klinik-klinik pratama jajaran Biddokkes Polda Kalbar terakreditasi seluruhnya.

d) peningkatan kualitas pelayanan kesamaptaaan

penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dalam rangka seleksi pendidikan pembentukan (Diktuk) dan pendidikan pengembangan (Dikbang) telah menunjukkan kinerja yang semakin bersih, transparan, akuntabel dan humanis didukung oleh SDM yang profesional, sistem dan metoda yang yang cukup memadai dan peralatan yang terstandarisasi disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang efektif

## 2) Kelemahan ( *Weaknesses* )

a) sumber daya Dokkes Polda masih belum memadai dihadapkan dengan tuntutan dan harapan:

(1) fasilitas-fasilitas kesehatan sampai tingkat kewilayahan pada umumnya belum memenuhi standarisasi sarana prasarana, peralatan dan tenaga. Tantangan dan tuntutan tugas yang dihadapi mengharuskan Biddokkes menyiapkan kemampuan yang memadai termasuk peralatan dengan teknologi modern;

(2) Adanya keterbatasan dalam kuantitas dan kualitas personel dibandingkan kebutuhan dan banyaknya personel yang mutasi ke Biddokkes Polda Kalbar dalam rangka berobat sehingga tidak produktif;

(3) alokasi anggaran yang tersedia masih terbatas sehingga belum berfungsi dukungan kesehatan, pelayanan kesehatan dan operasional Dokkes Polda Kalbar dapat terdukung

b) kemampuan .....

- b) kemampuan Dokpol yang terstandarisasi sesuai level kemampuan belum cukup merata sampai tingkat Polres, padahal dukungan Dokpol yang cepat dan tepat diperlukan setiap saat di TKP. Kekuatan Dokpol yang meliputi fasilitas, peralatan, tenaga, system dan metoda perlu dibangun dari tingkat Polda sampai tingkat Polres;
- c) masih terdapat ketidakpuasan terhadap pelayanan Dokpol, Kespol dan Poliklinik akibat dari :
  - (1) budaya melayani yang berorientasi pada kepuasan pelanggan/budaya pelayanan prima masih belum terbangun di seluruh jajaran Dokkes;
  - (2) belum terpenuhinya kebutuhan fasilitas, peralatan, ketenagaan serta kemampuan pada FKTP/Poliklinik jajaran Polda Kalbar
  - (3) terbatasnya personel baik secara kuantitas, kualitas maupun kualifikasi dibandingkan dengan kebutuhan tingkat kemampuan dan standar pelayanan kesehatan pada seluruh FKTP/Poliklinik.
- d) cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan Polri bagi masyarakat Polri Polda Kalbar sampai tingkat Polsek belum optimal karena:
  - (1) dislokasi Faskes Polri/ FKTP dibandingkan dengan luas dan kondisi geografis tidak memadai;
  - (2) kemampuan FKTP pada umumnya belum sesuai standar sehingga sistem rujukan atau sistem pelayanan yang berjenjang belum efektif dan efisien.
  - (3) kemitraan dengan instansi kesehatan setempat khususnya Puskesmas di wilayah Polsek belum optimal dalam lingkup kerjasama, hak dan kewajiban masing-masing pihak serta pemanfaatan sumber daya yang ada.
- e) Upaya .....

- e) Upaya pemeliharaan kondisi sehat samapta bagi personel Polri maupun satuannya belum optimal karena keterbatasan pada sistem dan metoda serta kemampuan di bidang promotif/preventif Kesmapta. SDM Polri yang direkrut dari masyarakat umum yang memenuhi kriteria kesehatan melalui Rikkes seleksi harus dipelihara, dan ditingkatkan kondisi sehat samaptanya serta dilindungi dari resiko penyakit dan kecelakaan khususnya di tempat/lingkungan kerja.

**3) Peluang (*Opportunities*)**

- a) reformasi di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia termasuk di Institusi Polri terus berlangsung, merupakan momentum yang baik untuk melakukan perubahan budaya organisasi Dokkes guna peningkatan kinerja;
- b) potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata kemanan yang dihadapi Polda Kalbar pada berbagai situasi dan kasus sangat membutuhkan dukungan dan kontribusi nyata dari Biddokkes Polda Kalbar, misalnya pada pandemi Covid-19, terorisme, kriminal, narkoba, dan bencana;
- c) kerjasama dan kemitraan yang terjalin baik sebagai realisasi MoU dan bentuk kerjasama lain dengan berbagai institusi baik pemerintah, swasta dari dalam dan luar negeri membuka kesempatan Biddokkes Polda Kalbar untuk meningkatkan sumber daya dan kinerjanya;
- d) kebijakan pemerintah di bidang kesehatan mendorong peningkatan upaya pelayanan kesehatan sebagai hak dasar setiap individu, diberlakukannya undang-undang sistem jaminan sosial Nasional bidang kesehatan mendorong Poliklinik Polri untuk berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai mitra dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);

e) Adanya .....

- e) Adanya regulasi yang mengatur agar Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melaksanakan akreditasi untuk pembinaan peningkatan mutu dan kualitas pelayanan.

#### 4) **Ancaman(Threats)**

- a) Polri menghadapi berbagai macam ancaman dan gangguan di bidang Kamtibmas dan Kamdagri, yang terkait dengan Bidang Dokkes meliputi:
  - (1) peredaran gelap produk farmasi yang meliputi obat, makanan-minuman, kosmetika dan obat tradisional ilegal/palsu yang sangat membahayakan bagi kesehatan manusia dan penyebaran penyakit-penyakit tertentu;
  - (2) dampak globalisasi yang mendorong peningkatan kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia/*human trafficking*, pencurian kekayaan negara dan berbagai bentuk terorisme termasuk teror Nubika ( *weapon of mass destruction* );
  - (3) wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang kurang terjangkau pengawasannya menimbulkan kerawanan antara lain penyelundupan dan peredaran gelap produk farmasi yang sangat membahayakan bagi kesehatan manusia dan penyebaran penyakit-penyakit tertentu.
- b) Munculnya berbagai penyakit menular tertentu seperti pandemi Covid-19, HIV/AIDS, Avian Influenza/flu burung dan sebagainya di samping menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat juga berdampak terhadap Kamtibmas. Jika timbul epidemik yang berkembang menjadi pandemik (jumlah penderita meningkat dengan sangat cepat dan meluas) maka akan terjadi situasi kedaruratan nasional/regional/global.

Menurut analisis ahli epidemiologi dunia kondisi pandemik suatu penyakit karena virus yang bermutasi tinggal menunggu waktu. Untuk menghadapi ancaman semacam ini

Polri .....

Polri umumnya Dokkes polda Kalbar khususnya beserta unsure terkait (Dinkes, TNI dll) harus siap menanggulangi pada masyarakat Polri maupun masyarakat umum.

Disamping itu anggota Polri dan keluarganya termasuk kelompok rentan terjangkit sejumlah penyakit menular tertentu (HIV/AIDS, Hepatitis) baik sehubungan dengan penugasannya maupun perilaku yang beresiko tinggi;

- c) Keadaan umum kebutuhan masyarakat Polri terhadap pelayanan kesehatan adalah yang merata dan berkualitas yaitu tersedia dan terjangkau, tepat kebutuhan, tepat sumber daya, tepat profesi/etika profesi, wajar dan aman.
- d) Berbagai tantangan tugas yang semakin berat memerlukan postur personel Polri yang sehat dan samapta, yaitu sehat secara holistik, tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan tetapi terdapat kondisi fisik, mental emosional, sosial dan lingkungan yang berfungsi harmonis serta mampu melaksanakan tugas bahkan pada saat tertentu melampaui beban normal dengan tidak mengalami kelelahan yang berarti.

Adanya transisi epidemiologi yang menyebabkan pergeseran pola penyakit infeksi menjadi degenerative, sejalan dengan gaya hidup modern yang cenderung merubah pola makan dan kebiasaan hidup, juga sangat mempengaruhi kondisi sehat samapta pesonil Polri.

### **c. Permasalahan**

Dengan mencermati kondisi umum dan hasil analisa dengan pendekatan SWOT maka permasalahan yang teridentifikasi, adalah :

- 1) Organisasi dan Tata Kerja Biddokkes Polda Kalbar kurang memadai dengan perkembangan tuntutan dan beban tugas yang diemban serta hambatan pada pembinaan personel.
- 2) Sumber daya Biddokkes Polri masih belum memadai dihadapkan dengan tuntutan dan harapan

a) Fasilitas .....

- a) Fasilitas-fasilitas Biddokkes jajaran Polda Kalbar belum sepenuhnya memenuhi standarisasi sarana prasarana, peralatan dan tenaga serta keterbatasan luas lahan untuk pengembangan. Tantangan dan tuntutan tugas yang dihadapi mengharuskan Bidokkes Polda Kalbar menyiapkan kemampuan yang memadai termasuk peralatan dengan teknologi tinggi dan pengembangan fasilitas.
  - b) Adanya keterbatasan dalam kuantitas dan kualitas personel dibandingkan dengan kebutuhan.
  - c) Alokasi anggaran yang tersedia masih terbatas sehingga belum semua fungsi dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi secara optimal.
- 3) Belum meratanya kekuatan Dokpol yang terstandarisasi sesuai dengan standar pelayanan dan kemampuan Kedokteran Kepolisian dari tingkat Polda sampai ke Polres, padahal dukungan Dokpol yang cepat dan tepat diperlukan setiap saat di TKP.
  - 4) Semakin meningkatnya ancaman penyakit menular tertentu yang sangat berdampak luas seperti HIV/AIDS, termasuk di masyarakat Polri, sehingga pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan dan kesamaptaan personil/satuan Polri serta derajat kesehatan masyarakat Polri seharusnya lebih mengutamakan upaya pemeliharaan dan pencegahan (Promotif dan Preventif) yang dilaksanakan oleh fungsi Yankes dan Kesmapta, akan tetapi pengembangan kemampuan dan pengalokasian sumber daya yang ada pada bidang ini masih kurang memadai
  - 5) Peran fungsi Kesmapta dalam siklus manajemen SDM Polri dari rekrutmen, pendidikan, penugasan, pemeliharaan dan pengakhiran tugas melalui kegiatan Rikkes seleksi, Rikkes berkala dan kesehatan preventif kesmapta belum dapat diselenggarakan secara komprehensif.



- 6) Semakin meningkatnya ancaman peredaran gelap produk farmasi yang meliputi (obat, makanan-minuman, kosmetika dan obat tradisional) yang sangat membahayakan bagi kesehatan manusia, bahkan dapat menimbulkan kematian.
- 7) Cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan Polri bagi masyarakat Polri sampai tingkat Polsek belum optimal karena tidak meratanya kemampuan Faskes Polri di beberapa Poliklinik yang ada dalam memberikan layanan kesehatan kepada anggota dan keluarganya.
- 8) Kemitraan dengan instansi kesehatan setempat khususnya Puskesmas di Wilayah Polsek belum optimal dalam lingkup kerjasama hak dan kewajiban masing-masing pihak serta pemanfaatan sumber daya yang ada

## **BAB II**

### **PENJABARAN VISI, MISI POLDA SERTA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan analisis *SWOT* sebagaimana disebutkan di atas, Biddokkes Polda Kalbar menetapkan dan menjalankan visi, misi dan tujuan sebagai suatu Institusi dan kelembagaan yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, penuh dengan koordinasi dan meningkatkan sinergisitas dalam memberikan dan melaksanakan pencegahan kejahatan dan penegakan hukum kepada masyarakat.

Dengan visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk bersinergi maka akan membangkitkan dan mendorong seluruh insan Kepolisian Indonesia menjadi semakin cerdas, berbudaya dan diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreativitas dan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas dan kehidupan masyarakat ke depan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjabarkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 6 ayat (1);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
3. Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga 2020-2024.

#### **1. Visi Polda:**

Visi Polda Kalbar mengacu pada visi Polri yang menetapkan visi organisasi sampai dengan tahun 2024, yaitu:

**“Terwujudnya Kalimantan Barat yang Aman dan Tertib”**

Visi tersebut mengandung beberapa makna, yakni:

- a. Kalimantan .....

- a. Kalimantan Barat menjadi provinsi yang aman, bebas dari segala bentuk ancaman.
- b. Kalimantan Barat menjadi provinsi yang tertib.

## **2. Visi Biddokkes Polda Kalbar**

Untuk mewujudkan fungsi dan peran Biddokkes Polda Kalbar di bidang Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian (pelayanan kesehatan dan kesehatan kesmaptaan) yang dibutuhkan pada tugas operasional maupun pembinaan Polri harus direalisasikan secara optimal dengan kinerja tinggi serta mampu menjawab tantangan dan ancaman ke depan sesuai perkembangan lingkungan strategis, maka dirumuskan visi Biddokkes Polda Kalbar tahun 2020-2024 sebagai berikut :

**“Terwujudnya pelayanan kedokteran dan kesehatan kepolisian yang prima”.**

## **3. Misi Polda:**

Mengacu pada misi Polri, maka misi Polda Kalbar sampai dengan tahun 2024, yaitu: **“Melindungi, Melayani, dan Mengayomi Masyarakat”.**

Makna : Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh warga masyarakat Kalimantan Barat serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

## **4. Misi Biddokkes Polda Kalbar**

**“Menyelenggarakan kedokteran dan kesehatan kepolisian untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Polri seta pelayanan kepolisian secara professional, modern dan akuntabel.”**

Untuk memotivasi personel Dokkes Polri guna keberhasilan terwujudnya Misi Biddokkes Polda Kalbar maka ditetapkan slogan Biddokkes Polda Kalbar

**“PRIMA”**

Memiliki arti dan makna yang mendalam dimana

- a. **“P”** berasal dari kata **“Promoter”**, merupakan kebijakan pimpinan Polri dimana promoter berasal dari kata Profesional, modern dan terpercaya. Dalam hal ini, seluruh SDM Dokkes Polri harus Promoter dalam melakukan pelayanan.
- b. **“R”** berasal dari kata **“Responsif”**, diartikan sebagai sebuah kesadaran akan tugas yang dilakukan haruslah dengan sungguh-sungguh, memiliki kepekaan yang tinggi, serta cepat dan tanggap dalam keadaan darurat atau genting.
- c. **“I”** berasal dari kata **“Integritas”**, dimana seluruh SDM Dokkes Polri melaksanakan tugas dengan jujur seta konsisten antara perkataan dengan perbuatan, berperilaku terpuji, disiplin dan penuh dedikasi berdasarkan norma dan etika;
- d. **“M”** berasal dari kata **“Mahir”**, dimana seluruh SDM Dokkes dituntut untuk menguasai bidang keilmuannya, mampu menjalankan tugas, fungsi serta profesinya dengan tingkat kesalahan nol persen;
- e. **“A”** berasal dari kata **“Akuntabel”**, dimana dalam bekerja, seluruh SDM dilingkungan Dokkes Polri harus bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil.

## 5. Tujuan Polda :

Berdasarkan visi dan misi Polri, maka tujuan Polda Kalbar adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat;
- b. Menegakkan hukum berkeadilan;
- c. Mewujudkan Polda Kalbar yang profesional;
- d. Modernisasi pelayanan Polda Kalbar;
- e. Menerapkan manajemen Polda Kalbar yang terintegrasi dan terpercaya.

**6. Tujuan Biddokkes**

- a. Mewujudkan Biddokkes Polda Kalbar yang professional
- b. Modernisasi pelayanan kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian;
- c. Menerapkan manajemen Biddokkes Polda Kalbar yang terintegrasi dan terpercaya

**7. Sasaran Strategis Polda:**

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
1.	Menjamin terpeliharanya keamanan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat	1.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kalimantan Barat
2.	Menegakkan hukum secara berkeadilan	2.	Penegakan Hukum secara berkeadilan
3.	Mewujudkan Polri Yang profesional	3.	Profesionalisme SDM
4.	Modernisasi pelayanan Polri	4.	Modernisasi teknologi
5.	Menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.	5.	Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tatakelola pemerintahan yang bersih terbuka dan melayani

**8. Sasaran Strategis Biddokkes Polda Kalbar**

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
1.	Mewujudkan Polri yang profesional	1.	Profesionalisme SDM
2.	Modernisasi pelayanan Polri	2.	Modernisasi teknologi

**9. Pentahapan Kebijakan Polda Kalbar**

a. Tahun 2020

Melanjutkan pelayanan publik Polda Kalbar yang prima dan melalui peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan;

b. Tahun 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Kalbar yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Almatsus Polri yang modern;

c. Tahun 2022

Memantapkan pelayanan publik Polda Kalbar yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang professional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera;

d. Tahun 2023

Memantapkan kualitas pelayanan publik Polda Kalbar yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antar lembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah;

e. Tahun 2024

Melanjutkan memantapkan pelayanan publik Polda Kalbar yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan kesejahteraan personel Polda Kalbar.

**10. Pentahapan Kebijakan Biddokkes Polda Kalbar**

a. Tahun 2020

Melanjutkan pelayanan Biddokkes Polda Kalbar yang prima dan melalui peningkatan sumber daya manusia guna mewujudkan Polri yang sehat Samapta.

b. Tahun 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan Biddokkes Polda Kalbar yang prima dengan didukung oleh system dan metode yang berbasis IT.

c. Tahun 2022

Memantapkan kualitas pelayanan Biddokkes Polda Kalbar yang prima dengan peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang professional dan sumber daya aparatur yang kompeten dan berintegritas;

d. Tahun 2023

Memantapkan kualitas pelayanan Biddokkes Polda Kalbar yang prima, berorientasi kepada kepercayaan masyarakat Polri;

e. Tahun 2024

Terwujudnya peningkatan pelayanan Biddokkes Polda Kalbar yang prima kepada masyarakat Polri sampai wilayah terjauh.

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI POLDA, KERANGKA REGULASI**  
**DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

**1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda**

a. Sasaran strategis **“Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1) peningkatan kehadiran Polri pada 11 Lokasi prioritas dan 4 PLBN (Pos Lintas Batas Negara;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu :

a) meningkatkan infrastruktur, SDM, dan pelayanan operasional Polri pada wilayah lokasi prioritas dan PLBN (Pos Lintas Batas Negara);

b) meningkatkan kegiatan pelacakan dan penangkalan serta penegakan hukum terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN (darat dan laut).

2) pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan gangguan Kamtibmas lainnya.

b) melakukan Lidik Pamgal dan Binluh terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya.

c) meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya.

d) memperkuat sistem manajemen pengamanan Obvitnas dan Obvit lainnya.

e) Polsek sebagai lini terdepan Harkamtibmas.

3) peningkatan Pelaksanaan Operasi Kepolisian;

untuk .....



untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu :

- a) menyiapkan kegiatan operasi, meningkatkan kemampuan personel operasi dan melaksanakan supervisi operasi;
- b) menyiapkan kegiatan operasi sebelum, saat dan pasca pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

4) peningkatan keamanan laut;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan patroli perairan dan udara dalam mendeteksi termasuk penguatan kapasitas cakupan operasi keamanan laut di perbatasan dan Selat Malaka serta mengungkap kejahatan di laut;
- b) memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut.

5) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;
- b) peningkatan kualitas penerangan dan pendidikan tertib lalu lintas;
- c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda.

6) peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibmas.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menggerakkan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;

c) *partnership* .....

- c) *partnership* potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah tangkal Kamtibmas dan penegakan hukum terbatas.
- 7) melaksanakan “Efektifitas Operasional” kegiatan operasional Polri; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu :
- a) peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut :
    - (1) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;
    - (2) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan).
  - b) peningkatan kepercayaan public melalui manajemen media dengan langkah-langkah sebagai berikut :
    - (1) mengelola media konvensional dan media digital secara efektif dalam membangun kepercayaan publik;
    - (2) menetralsir berita negative (*hoax*) yang dapat mengganggu Kamtibmas.
  - c) penguatan sistem informasi Polri berbasis “*Big Data Polri*” dengan langkah-langkah sebagai berikut :
    - (1) melakukan pemutakhiran data Kepolisian secara akurat dan tepat waktu;
    - (2) mengintegrasikan sistem informasi Kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri;
    - (3) meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri.
- b. Sasaran strategis “**Penegakan Hukum secara Berkeadilan**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik;  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
    - a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum;

b) melaksanakan .....

- b) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik siber Polri guna mendukung penguatan pengamanan infrastruktur siber;
  - c) meningkatkan kerja sama internasional di bidang penyelidikan dan penyidikan;
  - d) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber;
  - e) serta penanganan dan penegakkan kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideology negara), lingkungan hidup (termasuk karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber;
  - f) peningkatan kemampuan, pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (Crime Scene Investigation).
- 2) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi criminal; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu :
- a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antarsatker Polda dan aparat penegak hukum;
  - b) standardisasi data kriminal;
  - c) mengembangkan sistem informasi kriminal yang terintegrasi.
- 3) pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak. untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu :
- a) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
  - b) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak;

c) melaksanakan .....

- c) melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan “*keadilan restoratif*” terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas.
- c. Sasaran strategis “**Profesionalisme SDM**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) peningkatan kualitas SDM Polda Kalbar  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
    - a) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional;
    - b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri yang siap kerja dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat;
    - c) melakukan sertifikasi bagi para tenaga pendidik, penyidik Polri dan penguatan kapasitas SDM Keamanan Siber;
    - d) meningkatkan kesejahteraan SDM.
  - 2) pemindahan personel Polri ke Ibu Kota Negara Baru.  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu :  
melakukan pendataan personel Polda Kalbar guna mengantisipasi permintaan Mabes Polri yang akan pindah ke Ibu Kota Negara Baru.
- d. Sasaran strategis “**Modernisasi Teknologi**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut :
- 1) modernisasi Sarana dan Prasarana Polda Kalbar.  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
    - a) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana 2020-2024;
    - b) modernisasi Sarana dan Prasarana operasional guna mendukung pelayanan Polda Kalbar;

c) moderenisasi .....

- c) modernisasi kapal kelas B-3 ke tipe 6 dengan ukuran panjang 6-28 M dan *Unmanned Aerial Vehicle (UAV)-Drone*.
  - d) membangun *Big Data/Single Data Entry* Polda Kalbar;
  - e) membangun rumah dinas/flat dan Rusun bagi personel Polda Kalbar.
- e. Sasaran strategis **“Sistem pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) melaksanakan “Layanan Publik Polri yang Prima”  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu :
    - a) meningkatkan inovasi layanan public;
    - b) meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal melalui akses yang mudah;
    - c) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan social kemasyarakatan.
  - 2) reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri;  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu :
    - a) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal; (*Janji Presiden*)
    - b) membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;
    - c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polda sampai dengan Polsek.
  - 3) melaksanakan **“Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut :
    - a) penguatan akuntabilitas kinerja Polda Kalbar.  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
      - (1) meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polda Kalbar;

(2) menyusun .....

- (2) menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu anggaran Polda Kalbar.
- b) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polda Kalbar.  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan adalah:
  - (1) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polda Kalbar;
  - (2) menyusun LKIP Polda Kalbar.
- 4) Melaksanakan “**Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut :
  - a) penguatan regulasi Polri  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
    - (1) memperkuat kerangka regulasi Polda Kalbar;
    - (2) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif.
  - b) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya dengan langkah-langkah sebagai berikut :
    - (1) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online* guna mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat;
    - (2) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan;
    - (3) mengefektifkan kegiatan Saber Pungli di area pelayanan publik.

## 2. **Arah Kebijakan dan Strategi Biddokkes Polda Kalbar**

- a. Sasaran strategis “**Profesionalisme SDM**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
  - 1) peningkatan kualitas SDM Polda Kalbar  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Biddokkes Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
    - a) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional;
    - b) meningkatkan kesejahteraan SDM.
  
- b. Sasaran strategis “**Modernisasi Teknologi**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut :
  - 1) modernisasi Sarana dan Prasarana Polda Kalbar.  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
    - a) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana 2020-2024;
    - b) Membangun dan mengembangkan fasilitas kesehatan Polri seperti Poliklinik
    - c) Pemenuhan dan modernisasi sarana dan prasarana operasional (matfaskes, Almatsus dan aplikasi) guna mendukung pelayanan Biddokkes Polda Kalbar;
    - d) Meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan.

## 3. **Kerangka Regulasi**

Polri dalam rangka menjalankan roda organisasi memerlukan pedoman maupun aturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri maupun terhadap masyarakat, karena tugas dan wewenang Polri yang diemban berkaitan dengan kepentingan masyarakat di bidang keamanan maupun penegakan hukum.

Renstra Biddokkes Polda Kalbar yang merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Biddokkes Polda Kalbar selain berisi perencanaan strategis, juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional yang tersusun dalam kerangka regulasi Biddokkes Polda Kalbar. Kerangka regulasi pada Renstra Biddokkes Polda Kalbar berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Biddokkes Polda Kalbar yang bersifat mengikat kepada personel Biddokkes Polda Kalbar maupun masyarakat yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang direncanakan akan dibuat atau direvisi selama 5 (lima) tahun ke depan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJMD 2020-2024.

#### **4. Kerangka Kelembagaan**

Dalam memenuhi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan organisasi Biddokkes Polda Kalbar yang efektif dan akuntabel, diperlukan suatu kerangka kelembagaan sesuai dengan program pembangunan Biddokkes Polda Kalbar yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk pada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antarorganisasi, serta sumber daya manusia. Organisasi Biddokkes Polda Kalbar mencakup tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar organisasi mencakup tata hubungan kerja inter dan antar organisasi Polri/lembaga pemerintah, sedangkan sumber daya manusia mencakup pejabat Polri dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut. Aspek sumber daya manusia Biddokkes Polda Kalbar di dalam kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*).

Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan dilakukan bersifat sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting, mendesak, serta diyakini akan memberi manfaat yang besar untuk mencapai arah bijak dan strategi Biddokkes Polda Kalbar dalam rangka terwujudnya pembinaan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sesuai kebutuhan, terselenggaranya pelayanan kesehatan Promotif, Preventif,



Kuratif dan Rehabilitatif serta terseleggaranya pelayanan kedokteran kepolisian.

Penguatan kelembagaan Polri juga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa postur kelembagaan Polri yang dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b. peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antar tugas, fungsi dan kewenangan yang berlaku di lingkungan Polri dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
- c. prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern;
- d. penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance* dan *clean government*); seperti transparansi, efektivitas, efisiensi dan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran negara.

Prioritas penguatan kelembagaan Polri sesuai dengan tuntutan kebutuhan tugas terhadap ancaman gangguan Kamtibmas, akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. pembentukan/penataan satuan organisasi kewilayahan pada tingkat Mabes, Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor;
- b. implementasi penyusunan Daftar Susunan Personel (DSP) berdasarkan analisa beban kerja;
- c. peningkatan tipologi satuan organisasi kewilayahan tingkat Polda, Polres dan Polsek;
- d. implementasi revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta monitoring pelaksanaannya;
- e. penyusunan nomenklatur/titelatur sesuai dengan hasil revisi/penyempurnaan SOTK;
- f. penataan wilayah hukum Polda/Polres;
- g. pembentukan SPN;

- h. pembentukan dan pengembangan Rumkit Polri;
- i. pemutakhiran data Satuan Kewilayahan;
- j. penguatan sentra-sentra pelayanan publik Polri.

Prioritas penguatan kelembagaan Biddokkes Polda Kalbar Polri sesuai dengan tuntutan kebutuhan tugas terhadap terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif, preventif dan rehabilitatif yang akan difokuskan peningkatan jumlah FKTP yang terakreditasi guna peningkatan layanan terhadap anggota Polri/PNS Polri yang berada di wilayah hukum Polda Kalbar.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Biddokkes Polda Kalbar, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 5 (lima) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Biddokkes Polda Kalbar dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis memiliki Indikator Kinerja Utama sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>IK PENUNJANG</b>							
SS3	Profesionalisme SDM Polda Kalbar	Jumlah giat seleksi Penerimaan calon Pegawai Polri di Polda Kalbar	4	4	4	4	4
		Jumlah giat seleksi pendidikan pengembangan di Polda Kalbar	5	5	5	5	5
		Jumlah pelayanan kesehatan Biddokkes Polda Kalbar	18	18	18	19	19
SS4	Modernisasi teknologi	Persentase pemenuhan Almatsus	84%	100%	100%	100%	100%

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 5 Program di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. program Dukungan Manajemen;
2. program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;
3. program Profesionalisme SDM Polri;

3. Program .....

4. program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
5. program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

## 2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan diatas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (Rupiah Murni (RM), Pinjaman Luar Negeri (PLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU). Pendanaan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada pada kepentingan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana terlampir.

### KERANGKA PENDANAAN

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1.	Profesionalisme SDM	1. Melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dengan proaktif untuk memperoleh calonPolisiyangberkualitas	RM PLN PDN PNBP	
		2. Mepedomani kebijakan minimal <i>zero growth</i> dalam penyelenggaraan rekrutmen personel Polri dan mempertimbangkan pengarusutamaan gender;		
		3. Meningkatkan kualitas jaminan kesehatan bagi pegawai Polri melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Kementerian Kesehatan;		
		4. Meningkatkan fasilitas kesehatan Polri;		

tabel .....

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
2.	Modernisasi teknologi	1. Mengusulkan kebutuhan minimal/ ideal alat materii khusus (Almatsus) Biddokes Polda Kalbar yang modern;	RM PLN PDN PNBP BLU	
		2. Memfasilitasi dan menyiapkan lahan serta membantu mengawasi pelaksanaan pembangunan dalam rangka memenuhi persyaratan dibangunnya bidang laboratorium forensik tingkat Polda;		
		3. Pembangunan laboratorium forensik serta peralatan forensik sesuai kebutuhan secara bertahap		
		4. Mendukung modernisasi teknologi kepolisian dilakukan melalui penelitian dan pengembangan antara lain: laboratorium forensik, laboratorium siber, Inafis, psikologi forensik, kedokteran forensik, sistem informasi kriminal nasional		

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Biddokkes Polda Kalbar Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Polda Kalbar, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Polda Kalbar dalam mendukung agenda pembangunan daerah.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Biddokkes Polda kalbar. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Satker dan personel Biddokkes Polda Kalbar sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Biddokkes Polda Kalbar Tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugasnya.

#### **1. Kaidah Pelaksana**

- a. mengutamakan sistem pelayanan publik kepolisian yang prima dengan menghadirkan negara (Polri) ke tengah-tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminasi, dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;
- b. pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis sebagai *civilian police* menuju *democratic policing*;

#### **2. Autentikasi dan distribusi**

- a. autentikasi Renstra Biddokkes Polda Kalbar berikut merupakan jbaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang telah disahkan oleh Kapolda sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;

b. distribusi .....

- b. distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh unit pada Satker Biddokkes Polda Kalbar untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program dan kegiatan guna pencapaian *outcome*.

Ditetapkan di : Pontianak

pada tanggal : 19 April 2021



KEPALA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN  
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

dr. CH. SUSILO DWIJATMOKO, S.Rad  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 64070883